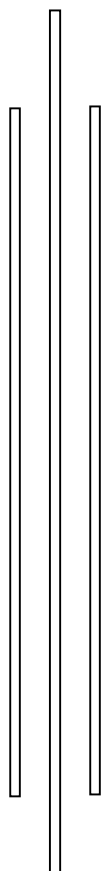




**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2014**

## **DAFTAR ISI**

Pernyataan Tanggung Jawab .....	
Laporan Realisasi Anggaran.....	
Neraca .....	
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	
- BAB I Pendahuluan .....	
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	
- BAB IV Kebijakan Akuntansi .....	
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	
- BAB VI Penjelasan Tambahan .....	
Lampiran – lampiran .....	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2014

Kepala SKPD SATPOL PP Kabupaten Blitar

**( TOHA MASHURI, S.Sos, MM)**

NIP. 19700219 199003 1 011

**SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(diganti Print out Simda)**

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2014;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2014)

**SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG.**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

**(diganti Print out Simda)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BLITAR**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 0,- mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 5.920.918.512,- atau mencapai 90.22 % dari anggarannya.

**b. Laporan Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 2.786.299.477,- yang terdiri dari aset lancar sebesar 1.010.000,- investasi jangka panjang sebesar Rp 0,- aset tetap sebesar Rp 2.785.289.477,- dana cadangan Rp 0,- dan aset lainnya sebesar Rp 0,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,-, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 2.786.299.477,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 1.010.000,- ekuitas dana investasi sebesar Rp 2.785.289.477,- dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp 0,-

### **c. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.



### **1.3. Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran (dihapus jika tidak punya pendapatan).

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. (dihapus jika tidak punya pendapatan)

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

#### **2.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar mempunyai SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- d. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur ;
- e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;
- f. Program.Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan ;
- g. Program.Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Perda ;

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp 6.562.925.450,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan NIHIL	0,00
2	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	6.144.425.450,00
3	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	418.500.000,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>6.562.925.450,00</b>

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp 5.920.918.512,00 atau 90,22 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp 642.006.938,00 atau 9,78 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	4.281.385.450,00	4.016.321.037,00	95,91
2	Belanja Langsung	2.281.540.000,00	1.904.597.475,00	83,47
3	Belanja Pegawai	47.770.000,00	46.630.000,00	97,59
4	Honorarium PPTK	24.620.000,00	24.130.000,00	98,00
5	Honorarium Pemeriksa Barang dan jasa	650.000,00	0,00	0,00
6	Honorarium Pengelola Keuangan	22.500.000,00	22.500.000,00	100
7	Belanja Alat Tulis Kantor	33.519.000,00	27.879.000,00	83,17
8	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.125.000,00	4.800.000,00	47,40
9	Belanja perangko dan benda pos	2.400.000,00	2.400.000,00	100
10	Belanja Peralatan dan bahan pembersih	8.188.000,00	5.000.000,00	61,06
11	Belanja Cinderamata/ karangan bunga	500.000,00	500.000,00	100
12	Belanja bahan material	1.500.000,00	1.500.000,00	100
13	Belanja Telepon	6.000.000,00	3.059.425,00	50,99
14	Belanja Dokumentasi dan dekorasi	6.225.000,00	5.310.000,00	85,30
15	Belanja Publikasi	4.250.000,00	2.628.000,00	61,83
16	Belanja Jasa Tenaga Teknis	5.350.000,00	5.350.000,00	100
17	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber	59.600.000,00	35.350.000,00	59,31
18	Belanja jasa service	10.000.000,00	7.055.000,00	70,55
	Jumlah Dipindahkan	4.524.582.450,00	4.210.412.462,00	

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	Jumlah Pindahan	4,524,582,450.00	4,210,412,462.00	
19	Belanja penggantian suku cadang	22.500.000,00	22.500.000,00	100
21	Belanja jasa KIR	1.000.000,00	300.000,00	30,00
22	Belanja jasa pengurusan STNK	10.500.000,00	10.500.000,00	100
23	Belanja Cetak	10.635.000,00	9.855.000,00	92,66
24	Belanja penggandaan	21.286.000,00	20.080.000,00	94,33
25	Belanja sewa gedung kantor/tempat	11.000.000,00	7.000.000,00	70,00
26	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.200.000,00	800.000,00	09,75
27	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.800.000,00	8.800.000,00	100
28	Belanja sewa Perlengkapan Kantor	6.180.000,00	6.105.000,00	98,78
29	Belanja Sewa Tenda	900.000,00	870.000,00	96,66
30	Belanja Sewa sound system	8.400.000,00	7.850.000,00	93,45
31	Belanja Makanan dan Minuman	307.415.000,00	254.777.500,00	82,87
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.180.000,00	62.590.000,00	97,52
33	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.175.000,00	4.175.000,00	58,18
34	Pengadaan pakaian dinas Sipil berserta kelengkapannya	107.550.000,00	106.095.000,00	98,64
35	Pengadaan pakaian Upacara	7.500.000,00	7.497.600,00	99,96
36	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan berserta kelengkapannya	126.780.000,00	126.742.000,00	99,97
37	Belanja Pakaian Olah Raga	36.000.000,00	35.300.000,00	98,05
38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	455.572.000,00	392.180.000,00	86,08
39	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	336.660.000,00	218.306.000,00	64,84
40	Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	100
41	Belanja Barang Untuk Hadiah Lomba	18.000.000,00	18.000.000,00	100
42	Belanja Transport Lokal non PNS	56.000.000,00	56.000.000,00	100
43	Belanja Modal Rak Besi / Metal	15.000.000,00	14.602.500,00	97,35
44	Belanja Modal Meja Kerja	26.000.000,00	25.311.000,00	97,35
45	Belanja Modal Meja Rapat	47.000.000,00	46.750.000,00	99,46
46	Belanja Modal Tenda	25.000.000,00	25.000.000,00	100
47	Belanja Modal Air Conditioning	14.000.000,00	13.750.000,00	98,21
48	Belanja Modal Alat Hiasan	30.000.000,00	29.848.500,00	99,49
49	Belanja Modal Komputer Laptop	37.000.000,00	36.019.500,00	97,35
50	Belanja Modal Printer	6.000.000,00	5.857.500,00	97,62
51	Belanja Modal Sound System	7.500.000,00	7.480.000,00	99,73
52	Belanja Modal Radio UHF/VHF	120.000.000,00	119.680.000,00	99,73
53	Belanja Modal Alarm / Sirine	30.000.000,00	29.799.000,00	99,33
54	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.000.000,00	23.800.000,00	99,16
55	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi / pool	34.500.000,00	34.330.000,00	99,50
	<b>Total</b>	<b>6.562.925.450,00</b>	<b>5.920.918.512,00</b>	<b>90,22</b>

### **3.2 Hambatan dan Kendala**

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- b. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- c. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

##### **1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

###### **a. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

###### **b. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

###### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

###### **d. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

## 1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## 2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

## 3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

## 4) **Gedungan dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

## 5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

#### **6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **7) Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

#### **8) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;



- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

**e. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

**f. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

**4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan persediaan sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

		<b>31 Desember 2014</b>	<b>31 Desember 2013</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>a. Aset</b>		<b>2.786.299.477,00</b>	<b>2.259.616.990,00</b>
	Saldo Aset SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(1)	Aset Lancar	1.010.000,00	1.020.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	2.785.289.477,00	2.258.596.990,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>2.786.299.477,00</b>	<b>2.259.616.990,00</b>

		<b>31 Desember 2014</b>	<b>31 Desember 2013</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1) Aset Lancar</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
	Saldo Aset Lancar SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar 1.010.000,-, dengan rincian sebagai berikut:		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	1.010.000,00	1.020.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>

		<b>31 Desember 2014</b>	<b>31 Desember 2013</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(a) Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
<b>(b) Piutang Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Piutang Retribusi SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 terdiri dari

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	NIHIL	0,00
2		0,00
3		0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
<b>(c) Piutang lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo piutang lain-lain SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	NIHIL	0,00
2		0,00
3		0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
<b>(d) Persediaan</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.010.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	600.000,00
(2)	Alat listrik	120.000,00
(6)	Benda pos	60.000,00
(7)	Materai	30.000,00
(8)	Map	20.000,00
(14)	Persediaan kertas kop	75.000,00
(16)	Alat kebersihan	85.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.010.000,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>2) Investasi Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>3) Aset Tetap</b>	<b>2.785.289.477,00</b>	<b>2.258.596.990,00</b>

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp **2.258.616.990,00** dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp **2.786.289.477,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	2.724.659.477,00	2.256.096.990,00
(c)	Gedung dan Bangunan	58.130.000,00	0,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>2.785.289.477,00</b>	<b>2.258.616.990,00</b>

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2010 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(a) Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Tanah SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

#### **Saldo Awal Per 1 Januari 2014**

#### **Penambahan Aset Tetap Tanah**

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan  
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi		+
	<hr/>	
<b>Jumlah penambahan</b>		
<b>Pengurangan Aset Tetap Tanah</b>		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
	<hr/>	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		(.....) +
		<hr/>

**Saldo Akhir Per 31 Desember 2014**

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
	(Rp)	(Rp)
<b>(b) Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.724.659.477,00</b>	<b>2.258.596.990,00</b>

Saldo peralatan dan mesin SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2014*

**Saldo Awal Per 1 Januari 2014** **2.256.096.990,00**

**Penambahan Peralatan dan Mesin**

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	354.098.000,00
Hibah	
Mutasi	38.474.500,00
Reklasifikasi	
Koreksi	319.818.000,00 +
	<hr/>
<b>Jumlah penambahan</b>	<b>712.390.500,00</b>

**Pengurangan Peralatan dan Mesin**

Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)

Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	( 243.828.013,00 )	+
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<u>( 243.828.013,00 )</u> +
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2014</b>		<b>2.724.659.477,00</b>

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 8 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2010</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>(c) Gedung dan Bangunan</b>	<b>58.130.000,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo gedung dan bangunan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp 58.130.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

**Saldo Awal Per 1 Januari 2014**

**Penambahan Gedung dan Bangunan 0,00**

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	58.130.000,00	
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		+
<b>Jumlah penambahan</b>	<b>58.130.000,00</b>	

**Pengurangan Gedung dan Bangunan**

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<u>(.....)</u> +

<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2014</b>	<b>58.130.000,00</b>
---	----------------------

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014*

	<b>31 Desember 2014</b>	<b>31 Desember 2013</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2014</b>	<b>2.500.000,00</b>
--------------------------------------	---------------------

**Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi**

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
<b>Jumlah penambahan</b>	

**Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi**

Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)
Hibah	(.....)
Reklasifikasi	(.....)
Koreksi	(.....) +
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(.....) +</b>

<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2014</b>	<b>2.500.000,00</b>
---	---------------------

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(e) Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

**Saldo Awal Per 1 Januari 2014** **NIHIL**

**Penambahan Aset Tetap Lainnya**

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan  
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

**Jumlah penambahan**

**Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

**Jumlah Pengurangan** (.....) +

**Saldo Akhir Per 31 Desember 2014** **NIHIL**

Rincian perolehan aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(f) Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 / NIHIL dengan rincian sebagai berikut:



NO	NAMA KONSTRUKSI	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	<i>NIHIL</i>	NIHIL	NIHIL
2			
	JUMLAH	0,00	0,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>4) Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 ( *NIHIL* )

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>5) Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2010 (Rp0,00-Rp0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(a) Aset Tak Berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 merupakan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .. ( *ex : software/perangkat lunak* ) dengan perincian sebagai berikut.

**Saldo Awal Per 1 Januari 2014** **0,00**

**Penambahan Aset Tak Berwujud**

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan  
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi		
Koreksi		+
<b>Jumlah penambahan</b>	<hr/>	
<b>Pengurangan Aset Tak Berwujud</b>		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<hr/>	(.....) +
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2014</b>		<b>NIHIL</b>

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 (*nihil*) sebesar Rp0,00, terdiri dari (*Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp 0,00, dengan perincian mutasi sebagai berikut.*

**Saldo Awal Per 1 Januari 2014**

**Penambahan Aset Lain-Lain** **0,00**

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
<b>Jumlah penambahan</b>	<hr/>

**Pengurangan Aset Lain-lain**

Penghapusan	(.....)
-------------	---------

Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>(.....) +</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2014</b>		<b>NIHIL</b>

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp 0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	NIHIL		
2			
3			
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2014 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	<i>NIHIL</i>		
2			
3			
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>b. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo KewajibanSKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014adalah sebesar (*nihil*) Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>1) Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	<i>NIHIL</i>	0,00
(b)		0,00
(c)		0,00
<b>Jumlah Hutang</b>		<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>2) Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar ( *nihil* ) Rp0,00.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>c. Ekuitas Dana</b>	<b>2.786.299.477,00</b>	<b>2.259.616.990,00</b>

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.786.289.477,00 dengan rincian sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>1) Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.010.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	1.010.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
(d)		0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>1.010.000,00</b>

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
<b>2) Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>2.785.289.477,00</b>	<b>2.258.596.990,00</b>

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.785.279.477,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.785.289.477,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>2.785.289.477,00</b>

## 2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
<b>a. Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2014 serta realisasi Tahun Anggaran 2013, adalah (*nihil*) sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
<b>b. Belanja</b>	<b>5.920.918.512,00</b>	<b>5.413.877.919,00</b>

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014 SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
<b>1) Belanja Operasi</b>	<b>5.920.918.512,00</b>	<b>5.413.877.919,00</b>

Belanja Operasi SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp 5.490.690.512,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(a)	Belanja Pegawai	4.329.155.450,00	4.062.951.037,00	3.759.962.944,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	1.797.270.000,00	1.427.739.475,00	1.653.914.975,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.126.425.450,00</b>	<b>5.490.690.512,00</b>	<b>5.413.877.919,00</b>

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitar realisasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.281.385.450,00</b>	<b>4.016.321.037,00</b>	<b>3.759.962.944,00</b>
	Gaji dan Tunjangan	3.802.385.450,00	3.631.096.037,00	3.351.807.944,00
	Tambahan Penghasilan PNS	479.000.000,00	385.225.000,00	358.550.000,00
<b>1.</b>	<b>Jumlah Belanja Tak Langsung (1)</b>	<b>4.281.385.450,00</b>	<b>4.016.321.037,00</b>	<b>3.759.962.944,00</b>
	<b>Belanja Langsung</b>			
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>47.770.000,00</b>	<b>46.630.000,00</b>	<b>49.605.000,00</b>
	Honorarium PNS	47.770.000,00	46.630.000,00	31.855.000,00
	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	17.750.000,00
	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>1.815.270.000,00</b>	<b>1.445.739.475,00</b>	<b>1.653.914.975,00</b>

	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	54.732.000,00	40.579.000,00	41.152.000,00
	Belanja Bahan/Material	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja Jasa Kantor	<b>81.455.000,00</b>	<b>51.697.425,00</b>	<b>516.017.075,00</b>
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.350.000,00	53.705.000,00	56.644.200,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.921.000,00	29.935.000,00	32.853.700,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	<b>19.200.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,00	8.800.000,00	14.300.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.480.000,00	14.825.000,00	7.675.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	<b>378.770.000,00</b>	<b>354.777.500,00</b>	<b>164.816.500,00</b>
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	115.050.000,00	113.592.600,00	0,00
	Belanja Pakaian Kerja	126.780.000,00	126.742.000,00	66.574.500,00
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	36.000.000,00	35.300.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	792.232.000,00	610.486.950,00	551.732.000,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	21.999.000,00	23.950.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Transport Lokal Non PNS	56.000.000,00	56.000.000,00	168.100.000,00
	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Jumlah Belanja Langsung (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah 1 dan 2</b>	<b>6.126.425.450,00</b>	<b>5.490.690.512,00</b>	<b>5.413.877.919,00</b>

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.18.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan/Belanja	Rupiah
1	Belanja Hadiah Lomba	18.000.000,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>18.000.000,00</b>

31 Desember 2014  
(Rp)

31 Desember 2013  
(Rp)

**2) Belanja Modal**

**412.288.000,00**

**765.868.000,00**

Belanja Modal SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Blitarmeliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan,

Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 Rp 412.288.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
<b>1.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	505.061.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	14.602.500,00	2.400.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	3.218.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.000.000,00	41.877.000,00	65.095.000,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	98.000.000,00	97.061.000,00	41.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30.000.000,00	29.848.500,00	9.981.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	7.480.000,00	14.905.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	120.000.000,00	119.680.000,00	113.727.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	30.000.000,00	29.799.000,00	9.981.000,00
	<b>Jumlah 1</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>354.098.000,00</b>	<b>765.868.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung</b>			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	58.500.000,00	58.130.000,00	0,00
	<b>Jumlah 2</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.130.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>418.500.000,00</b>	<b>412.228.000,00</b>	<b>765.868.000,00</b>

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp 412.228.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00*);

**BAB VI**  
**PENJELASAN TAMBAHAN**

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pada penyusunan Laporan Keuangan 2014 telah melakukan penyesuaian rekening asset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 untuk data neraca awal tahun 2014 sehingga asset tetap pada SIMDA dan SIMBADA dapat dibandingkan.

Proses perubahan Rekening Aset Tetap tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca Per 31 Desember 2013 (setelah Audit)
2. Hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara BPKAD dengan SKPD per 31 Desember 2013.
3. *Print Out* SIMBADA Rincian Barang Ke Neraca Tahun Anggaran 2013.

Adapun Berita Acara beserta Kertas Kerja penyesuaian rekening asset tetap terlampir

Blitar, 31 Desember 2014  
Kepala SKPD SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA Kabupaten Blitar

**( TOHA MASHURI, S.Sos, MM)**

NIP. 19700219 199003 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan SEMERU 40 Telp/Fax 805022 e-mail: satpolpp@blitarkab.go.id

**B L I T A R**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu empat belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOHA MASHURI, S.Sos, MM  
 NIP : 19700219 199003 1 002  
 Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : ARGO SANTOSO  
 NIP : 19710601200312 1 003  
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/38/409.012/KPTS/2014 tanggal 15 Januari 2014 ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	= Rp.	0,-
b. Uang logam	= Rp.	0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	= Rp.	-
d. Saldo Bank	= Rp.	0,-
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	= Rp.	0,-
Jumlah	= Rp.	0,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah	= Rp.	0,-
Perbedaan Positif/Negatif antar Saldo Kas dan Saldo buku	= Rp.	0,-

Penjelasan Perbedaan positif/negatif :

.....  
 .....

Yang diperiksa, Bendahara Pengeluaran/penerimaan	Blitar, 31 Desember 2014 Yang memeriksa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
---	---

Blitar, 31 Desember 2014

Yang diperiksa,  
Bendahara Pengeluaran/penerimaan  
Anggaran

Yang memeriksa,  
Pengguna Anggaran/Kuasa Penguasaan  
Satuan Polisi Pamong Praja

**TOHA MASHURI, S.Sos, MM**

NIP. 19700219 199003 1 002

Lampiran 2

**Foto Copy Rekening Koran**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ..**

Jalan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . Telp.  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
**B L I T A R**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI**

Pada hari ini SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . tanggal Tiga puluh satu Desember Dua ribu sebelas, kami  
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pengguna Barang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59  
Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Bendahara Barang

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor tanggal ditugaskan mengurus barang, berdasarkan  
hasil pemeriksaan barang serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami mendapatkan  
hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2014:

No	Nama Persediaan	Nilai (Rp.)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp.
2.	Persediaan Alat Listrik	Rp.
3.	Persediaan Material/Bahan	Rp.

4.	Persediaan Benda Pos	Rp.
5.	Persediaan Bahan bakar	Rp.
6.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp.
7.	Persediaan Barang Cetakan	Rp.
8.	Persediaan Alat Kebersihan	Rp.
9.	Persediaan Barang Bantuan Modal	Rp.

Rincian hasil pemeriksaan fisik persediaan terlampir.

Blitar, 31 Desember 2014

Yang diperiksa,  
Pengurus Barang

Yang memeriksa,  
Pengguna Barang

**NAMA LENGKAP**

**NAMA LENGKAP**

NIP.

NIP.

**Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik  
Persediaan Barang Habis Pakai  
Per 31 Desember 2014**

**Daftar Persediaan Barang Habis Pakai Per 31 Desember 2014**

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
	Persediaan Alat Tulis kantor				
	Persediaan Alat Tulis Kantor				
	Persediaan Alat Listrik				
	Persediaan Alat-alat Listrik				
	Persediaan Material/Bahan				
	Persediaan Bahan Baku Bangunan				
	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas				
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman				
	Persediaan Bibit Ternak				
	Persediaan Obat-obatan				
	Persediaan Bahan Kimia				
	Persediaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis				
	Persediaan Bahan Praktek/Pelatihan				
	Persediaan Bahan Material Lainnya				
	Persediaan Bahan Radiologi				
	Persediaan Lenen				
	Persediaan Bahan Pakaian Dinas				
	Persediaan Benda Pos				
	Persediaan Benda Pos, Perangko dan Materai				
	Persediaan Materai				
	Persediaan Kertas Segel				
	Persediaan Amplop				
	Persediaan Bahan Bakar				
	Persediaan Bahan Bakar Minyak				
	Persediaan Bahan Bakar Gas				
	Persediaan Bahan Makanan Pokok				
	Persediaan Bahan Makanan Logistik				

	Persediaan Bahan Makanan Pasien (RSUD)				
	Persediaan Barang Cetak				
	Persediaan Karcis				
	Persediaan Buku Cetak				
	Persediaan Stiker				
	Persediaan Blangko				
	Persediaan Map				
	Persediaan Kertas Kop				
	Persediaan Amplop				
	Persediaan Alat Kebersihan				
	Persediaan Alat Kebersihan				

*\*) Diisi sesuai keadaan yang ada dimasing-masing SKPD/ hilangkan item yang tidak ada*

Blitar, 31 Desember 2014

Yang memeriksa,  
Pengguna Barang

Yang diperiksa,  
Bendahara Barang

**NAMA LENGKAP**  
NIP.

**NAMA LENGKAP**  
NIP.

Lampiran 4

**Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2014**

Lampiran 5

**Daftar Inventarisasi Aset Daerah Extra Komptabel Perolehan 2014**

Lampiran 6

**Rincian Mutasi Aset Tanah 2014**

Lampiran 7

**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2014**



Lampiran 8

**Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2014**

Lampiran 9

**Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2014**

Lampiran 10

**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2014**

Lampiran 11

**Lain-lain:**

**- Memo Jurnal Penyesuaian/koreksi**

**- Bukti Penyesuaian/koreksi**

Lampiran 12

**Kertas Kerja Mapping Saldo Awal 2014**